

Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Kampung Hijau

Rury Febrina¹, Auradian Marta², Raja Muhammad Amin³, Sofyan Hadi⁴, Margina Ferlan⁵, Meris Essio Mento⁶

¹ Universitas Riau, Indonesia; rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

² Universitas Riau, Indonesia; auradian.marta@lecturer.unri.ac.id

³ Universitas Riau, Indonesia; muhammadamin@lecturer.unri.ac.id

⁴ Universitas Riau, Indonesia; sofyanhadi002@lecturer.unri.ac.id

⁵ Universitas Riau, Indonesia; marginaferlan@lecturer.unri.ac.id

⁶ Universitas Riau, Indonesia; meris.essio@lecturer.unri.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Governance;
BUMDes; BUMKam;
Green Siak, Green Village;
Community Empowerment

Article history:

Received 2024-12-25

Revised 2025-01-21

Accepted 2025-03-10

ABSTRACT

Siak District encourages efforts to support sustainable development through Regional Regulation No. 4 of 2022 concerning Siak Green District. Siak Hijau District regulates the sustainable management of natural resources in several utilization zones with the aim of harmonizing efforts to save and protect the environment with the economic benefits of natural resource management, which still considers aspects of environmental sustainability. This policy goal is very strategically integrated with ecological-based BUMKam management. This community service was carried out in Dosan Village, Pusako District. The method is done through presentations, discussions, brainstorming, simulations, effective facilitation of the community and BUMKam managers to identify business opportunities that are in accordance with the natural resource utilization zone, so that it is expected to become a village development model that supports sustainable development in Siak District. The results of the service show that BUMKam Kampung Dosan can be developed through optimizing local potential. Kampung Dosan Pusako Sub-district has tourism potential in the form of Lake Naga Sakti and Khalifah Sulaiman Green Park as an effort to develop the type of BUMKam business. In addition, it is necessary to have the ability to obtain business opportunities through the establishment and management of a Waste Bank as well as clean water and environmental management by BUMKam Kampung Dosan.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rury Febrina

Universitas Riau, Indonesia; rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi untuk meningkatkan lanskap ekonomi dan mewujudkan potensi desa. Otoritas pemerintah desa, sebagai manifestasi pemerintahan yang paling dekat kepada masyarakat, harus memahami pentingnya BUMDes dalam mendorong kemajuan desa. Partisipasi penduduk desa sangat dibutuhkan untuk mencapai otonomi yang lebih luas khususnya dalam pengelolaan potensi lokal. BUMDes dilembagakan sesuai dengan mandat yang diartikulasikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendirian BUMDes oleh desa diharapkan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi dan sebagai instrumen perlindungan sosial di masyarakat.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengizinkan Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disebut "BUMDes", yang dikelola dengan semangat keluarga dan rasa kerja sama komunal. BUMDes berperan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis dalam bidang ekonomi keuangan atau layanan publik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi utama BUMDes adalah untuk mengoptimalkan potensi desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan semua potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan lembaga ekonomi. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan konstituentnya dan menjadi landasan kerangka ekonomi desa. Namun demikian, BUMDes sebagai upaya untuk mempromosikan potensi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui unit bisnis masih jauh dari harapan, karena pemahaman para pejabat desa, khususnya kepala desa, tentang BUMDes masih sangat terbatas disebabkan fokus hanya pada Pembangunan fisik karena memiliki manifestasi yang fisik. Ini sangat kontras dengan upaya pemberdayaan yang lebih terprogram, yang hasilnya tidak mudah dirasakan langsung maupun diamati. Pembangunan sumber daya manusia yang tidak memadai menghambat kemajuan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan di dalam desa.

Penyusunan regulasi di tingkat kampung/desa sebagai arahan pembangunan desa/kampung agar sejalan dengan Siak Kabupaten Hijau dalam rancangan penelitian ini adalah di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan: (1) Sebagai desa/kampung yang relatif lama atau sudah tua, terbentuk tahun 1905-1925, (2) BUMKam Permodalan Kampung Dosan Kecamatan Pusako salah satu BUMDes yang harus terus digenjot perkembangannya. (3) Kampung Dosan Kecamatan Pusako memiliki potensi alam berupa Danau Naga Sakti dan Taman Hijau Khalifah Sulaiman sebagai upaya pengembangan jenis usaha BUMDes. (4) Berdasarkan Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau tahun 2019, dinyatakan bahwa Kecamatan Pusako sebagai zona konservasi, zona tanaman pangan, zona perkebunan dan kehutanan serta zona pemukiman wilayah, kecuali zona industri. Berangkat dari persoalan yang disampaikan di atas, maka penting dilakukan pengabdian terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Berbasis Kampung Hijau Di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Tujuan kegiatan sesuai dengan perumusan masalah yaitu; 1). Mengeksplorasi pemahaman Pembangunan Pedesaan yang berbasis Kampung Hijau di Kampung Dosan di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. 2). Mengeksplorasi pemahaman Tata Kelola BUMDes di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. 3). Mengeksplorasi Pembangunan Pedesaan berbasis Kampung Hijau di Kampung Dosan melalui Tata Kelola BUMDes di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Tantangan yang dihadapi dalam memajukan BUMKam di Kabupaten Siak bergantung pada faktor pendukung penting yang mendukung keberhasilan BUMDes, antara lain: 1). Kemampuan yang luas dalam memanfaatkan peluang bisnis, 2). Identifikasi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, 4). Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan unit bisnis yang dioperasikan oleh BUMDes, 5). Dukungan kuat dari pemerintah daerah. Di sisi lain, hambatan yang dihadapi BUMDes adalah: 1). Kekurangan modal kerja, 2). Kelangkaan sumber daya manusia terampil dalam BUMDes, 3). Dukungan administratif yang tidak memadai dari lembaga terkait, 4). Kekurangan dalam jejaring sosial yang menghubungkan BUMDes dengan entitas eksternal, dan 5). Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peran penting BUMDes sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi. Meskipun

demikian, ketika mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan pengabdian, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk upaya yang lebih terpadu untuk menjalin pembangunan ekonomi desa melalui BUMDES dengan inisiatif pelestarian lingkungan, terutama sesuai dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau.

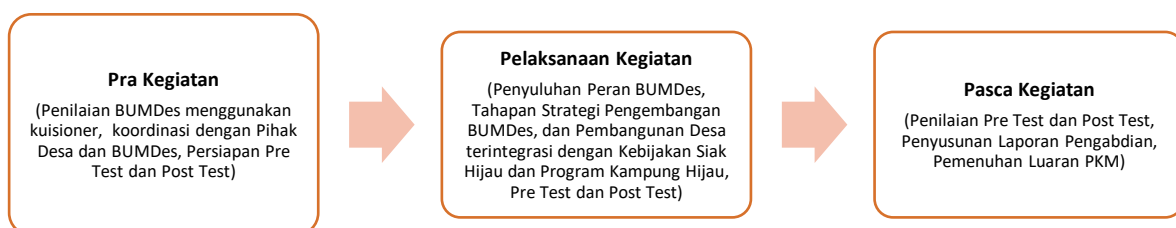
2. METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan penyuluhan dan konsultasi melalui metode fasilitasi efektif (diskusi, brainstorming, dan simulasi). Beberapa indikator kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu (1) Peran BUMDes dalam Pembangunan Berkelanjutan, (2) Tahapan strategi pengembangan BUMDes, (3) Pembangunan Desa terintegrasi yang dengan Kebijakan Siak Hijau dan pelaksanaan Program Kampung Hijau. Adapun indicator pencapaian kompetensi dasar tersebut yaitu:

1. Peran BUMDes
 - a. Peserta mengetahui arti peran BUMDes sebagai instrumen otonomi desa.
 - b. Peserta mengetahui peran BUMDes sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa dan kebijakan yang mengaturnya.
2. Tahapan Strategi Pengembangan BUMDes (7 Tahapan Pengembangan BUMDes Unggul):
 - a. Revitalisasi kelembagaan BUMDes/BUMDes bersama;
 - b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes/BUMDes bersama;
 - c. Penguatan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes bersama dan Unit Usaha BUMDes/BUMDes bersama;
 - d. Penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
3. Pembangunan Desa terintegrasi dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau
 - a. Pembangunan pedesaan berkelanjutan dengan memperhatikan penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
 - b. Pembangunan pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Mitra pengabdian adalah Pemerintah Kampung Dosan Kecamatan Dusun Pusako Kabupaten Siak. Peserta berasal dengan jumlah 25 Orang dari unsur; Penghulu Kampung Dosan (Kepala Desa) dan Perangkatnya, Badan Permusyawaratan Kampung, Pendamping Kampung, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Lembaga Adat Desa, Tokoh Masyarakat dan Pengelola BUMKam.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dimulai dari pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan dengan rincian yaitu:



Gambar 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan publik biasanya didefinisikan sebagai Kesejahteraan Ekonomi, tetapi ada juga orang-orang yang mendefinisikannya sebagai Kepuasan Sosial. Dalam Kesejahteraan Ekonomi, dikatakan bahwa setiap individu atau masyarakat harus mendukung kebutuhan material yang lebih besar (barang dan jasa), dengan sedikit menyebutkan masalah ilmu sosial. BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa untuk memanfaatkan semua potensi ekonomi, lembaga ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes secara khusus tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perusahaan liabilitas terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes adalah entitas bisnis dengan karakteristik desa yang, dalam melakukan kegiatan, tidak hanya membantu administrasi pemerintah desa tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes juga dapat melakukan layanan, perdagangan, dan fungsi pengembangan ekonomi lainnya. Dengan meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat mengumpulkan tabungan pada skala lokal di komunitas desa, termasuk mengelola dana berputar, tabungan, dan pinjaman. Kegiatan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan akan mengembangkan unit bisnis untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Jika kegiatan bisnis dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat mungkin bahwa BUMDes akan mengikuti entitas hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum dan peraturan.

Pengembangan BUMDes bertujuan untuk memperluas strategi melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bisnis, pembangunan jaringan pemasaran, pembangunan modal, dan peningkatan partisipasi stakeholder BUMDes serta program atau kegiatan terintegrasi. BUMDes adalah entitas bisnis yang memiliki modal atau aset, sebagian atau seluruhnya berasal dari desa. Kami kemudian akan menggunakan modal ini untuk menciptakan unit bisnis BUM Village sesuai dengan pemetaan potensi desa. Dengan keberadaan unit bisnis, akan ada pergeseran roda ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan pekerjaan dan juga akan menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan ekonomi desa setempat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. BUMDes, seperti perusahaan, seperti BUMN, harus dikelola secara profesional, sehingga pemilihan manajer BUMDes harus didasarkan pada pemilihan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup. Tahap-tahap yang telah dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan BUMDes dalam menjalankan unit-unit bisnisnya adalah perencanaan untuk BUMDes; observasi BUMDes; struktur dan seleksi; pemeliharaan aset; dan pelaporan hasil. BUMDes adalah entitas bisnis milik desa yang memiliki fungsi untuk mengoptimalkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan semua potensi ekonomi, lembaga ekonomi, dan potensi sumber daya alam dan manusia. BUMDes tidak eksis secara eksklusif, tetapi BUMDes didirikan melalui peraturan desa, yang disiapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD, yang dikelola secara independen tetapi masih berada di bawah pengawasan pemerintah desa karena pendapatan dari setiap unit bisnis yang dikendalikan oleh BUMDes disertakan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). yang kemudian disalurkan untuk digunakan untuk membangun fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan diharapkan bahwa BUMDes dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan bagi penduduknya.

Untuk mencapai perencanaan organisasi, manajemen, implementasi, dan sistem pemantauan yang efektif dan efisien, pengembangan bersama BUMDes. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, bimbingan dan pengembangan bersama BUMDes dilakukan oleh Menteri Bimbingan Umum dan Pengembangan dan Menteri/pemimpin lembaga pemerintah non-pemerintah untuk bimbing dan pembangunan teknis, dan bimbingan dan pengembangannya juga dapat dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Panduan dan pengembangan bersama BUMDes dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi. Selain itu, dalam Pasal 25 Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, pengembangan bersama BUMDes dilakukan melalui strategi:

- 1) Revitalisasi lembaga bersama BUMDes/BUMDes;
- 2) Meningkatkan kualitas manajemen dan memperkuat organisasi BUMDes/BUMDes;
- 3) Memperkuat manajemen bisnis bersama BUMDes/ BUMDes dan unit bisnis desa/BUMDes bersama;
- 4) Meningkatkan kolaborasi atau kemitraan;
- 5) Memperkuat manajemen aset dan modal;
- 6) Memperbaiki manajemen administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas;
- 7) Meningkatkan manajemen keuntungan dan manfaat bagi desa dan komunitas desa.

BUMDes memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Integrasi BUMDes dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terbukti dalam berbagai strategi dan model yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya. Perusahaan-perusahaan ini berfungsi sebagai katalis untuk pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan masyarakat, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs desa. Perusahaan milik desa berbasis ekologis, yang dikenal sebagai BUMDes di Indonesia, sangat penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Integrasi prinsip-prinsip ekologi ke dalam pengelolaan BUMDes sangat penting untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kunci dari pengintegrasian BUMDes berbasis ekologi diantaranya dilihat dari aspek partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan penerapan kebijakan hijau sebagaimana dijelaskan pada penelitian terdahulu diantaranya;

Partisipasi Masyarakat

- Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan BUMDes, karena memastikan pengambilan keputusan inklusif dan menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan kebutuhan dan nilai lokal (Kamil & Isnani, 2024) (Rares et al., 2023).
- Tata kelola partisipatif mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk operasi yang berkelanjutan (Eprianti & Choiriyah, 2024).

Manajemen Sumber Daya Berkelanjutan

- BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya desa dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis. Ini melibatkan penerapan praktik yang meminimalkan dampak lingkungan dan mempromosikan konservasi (Hariniati et al., 2024).
- Integrasi praktik akuntansi hijau membantu BUMDes melacak dan melaporkan dampak lingkungannya, meningkatkan akuntabilitas dan mendorong praktik berkelanjutan (Hariniati et al., 2024).
- Integrasi kebijakan hijau, seperti yang terlihat dalam inisiatif Distrik Hijau Siak, menyoroti pentingnya menyelaraskan kegiatan BUMDes dengan tujuan konservasi dan keberlanjutan (Febrina et al., 2025).

Tata Kelola Transparan

- Praktik tata kelola yang efektif, termasuk transparansi dan akuntabilitas, sangat penting untuk keberlanjutan BUMDes. Praktik-praktik ini membantu dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi demi kepentingan terbaik komunitas (Kamil & Isnani, 2024) (Eprianti & Choiriyah, 2024).
- Penggunaan platform digital dapat meningkatkan transparansi dan visibilitas produk, berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang BUMDes (Eprianti & Choiriyah, 2024).

Pemberdayaan Ekonomi dan Diversifikasi

- BUMDes memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan modal, bantuan pemasaran, dan jaminan pasar kepada petani dan pengusaha lokal (Habib & Kiswanto, 2024).
- Diversifikasi bisnis dan manajemen risiko adalah strategi penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan eksternal dan memastikan ketahanan ekonomi BUMDE (Rares et al., 2023).

BUMDes berbasis ekologi menawarkan manfaat yang signifikan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Isu-isu seperti sumber daya keuangan yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik dan integrasi digital dapat menghambat efektivitasnya (Syafaat & Eprilianto, 2024) (Eprianti & Choiriyah, 2024). Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, manajemen sumber daya, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang BUMDes.

Kampung Dosan merupakan salah satu Kampung/Desa di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Perubahan penamaan desa menjadi Kampung didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Siak juga mengalami penyesuaian nama menjadi BUMKam atau Badan Usaha Milik Kampung. Nama BUMKam di Kampung Dusun Pusaka adalah BUMKam Permodalan Sejahtera Dosan dengan status nama ter verifikasi pada website <https://bumdes.kemendesa.go.id/>. Pemilihan Kampung Dusun Pusaka didasari atas potensi yang dimiliki desa yaitu Danau Naga Sakti dan Taman Hijau Khalifah Sulaiman dan potensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dokumentasi pesona Danau Naga Sakti dan Taman Hijau Khalifah Sulaiman dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut:



Gambar 2. Danau Naga Sakti Siak Tahun 2018

Sumber : <https://elang.or.id/membangun-danau-naga-sakti-menjadi-primadona-wisata-di-kabupaten-siak/>



Gambar 3. Taman Hijau Khalifah Sulaiman Siak Tahun 2024

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Pra kegiatan tim PKM bersama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata MBKM melakukan survei dengan tujuan melakukan bertujuan untuk menjadi instrumen penilaian perkembangan BUMKam Kabupaten Siak khususnya di Kampung Dosan. Muatan pertanyaan melihat parameter kelembagaan, parameter aturan/legalitas BUMKam, parameter usaha BUMKam, Parameter Administrasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban BUMKam, Parameter Permodalan dan Aset, Parameter Dampak BUMKam terhadap Masyarakat, serta pengelolaan BUMKam Berbasis Ekologis. Parameter ini menjadi alat ukur untuk menentukan penguatan apa yang diperlukan terkait BUMKam dan menjadi landasan dalam menyusun materi-materi pengabdian kepada masyarakat yang diberikan.

1. Peran BUMDes

Konsep peran merupakan dimensi status yang dinamis, dan pemeriksaan peran BUMDes dalam konteks fungsi pemerintah dan swasta mencakup tiga perhatian utama: kesadaran, mobilisasi masyarakat, dan penyediaan sumber daya manusia (Hadiwijoyo, 2018). BUMDes memiliki potensi untuk mengambil posisi strategis dalam meningkatkan perekonomian desa; namun, banyak BUMDes yang belum mencapai kesuksesan. Sangat penting untuk memperbarui, memperkuat, dan meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga BUMDes agar dapat beroperasi lebih efisien dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan mendorong pembangunan desa. Revitalisasi ini diperlukan agar kelembagaan BUMDes dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, tantangan baru, serta tuntutan dari masyarakat dan pemerintah desa. Berikut beberapa aspek dari revitalisasi kelembagaan BUMDes/BUMDes bersama:

- a. Evaluasi Struktur Organisasi
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Penguatan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
- d. Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan dan Tantangan Baru
- e. Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan

- f. Peningkatan Efisiensi Operasional
- g. Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

2. Tahapan Strategi Pengembangan BUMDes

Tahapan strategi pengembangan BUMDES di bagi menjadi 7 tahapan pengembangan diantaranya

- a. Revitalisasi kelembagaan BUMDes/BUMDes bersama;

Revitalisasi mengacu pada tindakan memberi energi atau meremajakan. Konsep revitalisasi bumdes memerlukan pemberdayaan kembali peran BUMDES dalam kerangka sosial dan ekonomi desa. Dengan cara ini, pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan desa dengan meningkatkan tata kelola kelembagaan dan selanjutnya meningkatkan pengelolaan unit usaha desa.

- b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes/BUMDes bersama;

Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau BUMDes bersama merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan organisasi bisnis yang dimiliki oleh desa. Tujuan dari peningkatan ini adalah agar BUMDes/BUMDes bersama dapat beroperasi secara lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang biasanya terlibat dalam peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes/BUMDes bersama. Dengan meningkatkan kualitas manajemen dan organisasi, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- c. Penguatan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes bersama dan Unit Usaha BUMDes/BUMDes bersama;

Penguatan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes bersama dan Unit Usaha BUMDes/BUMDes bersama merujuk pada upaya untuk memperkuat manajemen operasional bisnis yang dijalankan oleh BUMDes serta unit-unit usaha yang dimiliki. Hal ini mencakup berbagai strategi yang bertujuan agar BUMDes dan unit usahanya dapat beroperasi lebih efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan.

- d. Penguatan kerja sama atau kemitraan;

Penguatan kerja sama atau kemitraan merujuk pada upaya untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antara BUMDes/BUMDes bersama dengan berbagai pihak eksternal, baik itu pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, maupun pihak lain yang dapat mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas. Tujuan dari penguatan kerja sama atau kemitraan ini adalah untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, memperluas akses ke sumber daya, pasar, teknologi, dan pengetahuan yang dapat membantu pertumbuhan usaha BUMDes.

- e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan;

Penguatan pengelolaan aset dan permodalan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam mengelola aset serta memperkuat modal yang dimiliki oleh BUMDes/BUMDes bersama. Aset dan modal adalah fondasi penting dalam operasional bisnis, sehingga pengelolaan yang baik akan berpengaruh langsung pada kinerja dan keberlanjutan usaha BUMDes.

- f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas merujuk pada upaya untuk memperbaiki sistem manajemen internal BUMDes/BUMDes bersama, terutama dalam hal administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aspek ini sangat penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan usaha desa.

g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa merujuk pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes/BUMDes bersama untuk memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Pengelolaan yang baik terhadap keuntungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan utama pembentukan BUMDes, yakni pemberdayaan ekonomi desa, dapat tercapai.

3. Pembangunan Desa terintegrasi dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau

Pembangunan Desa yang terintegrasi dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau merujuk pada upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan inisiatif lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau adalah program yang mengedepankan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan integrasi pembangunan desa dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau:

- 1) Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 3) Pengurangan Emisi dan Pengelolaan Sampah
- 4) Pengembangan Ekowisata dan Usaha Ramah Lingkungan
- 5) Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
- 6) Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
- 7) Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan PKM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Pembangunan Pedesaan berbasis Kampung Hijau melalui Tata Kelola BUMKam di Kampung Dosan

Melalui pengintegrasian ini pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Desa yang mengadopsi Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Peningkatan yang terjadi dalam penelitian ini dapat dilihat dari *Pre-test* dan *post-test* digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerimaan dari peserta terhadap materi yang diberikan dan juga menjadi rekomendasi yang digunakan untuk pengembangan laporan pengabdian. Adapun desain *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan pada penelitian ini di gambarkan didalam pertanyaan mengenai; 1) peran BUMDES, 2). Tahapan Strategi Pengembangan BUMDes dalam tahapan strategi

pengembangan BUMDES di bagi menjadi 7 tahapan pengembangan dan 3). Pembangunan Desa terintegrasi dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah jumlah peserta yang terbatas, pemahaman peserta yang terbatas terkait kebijakan siak hijau dan keterbatasan peserta dalam menangkap peluang pengembangan usaha yang berbasis *ecologis*. secara umum juga terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES dimulai dari kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan, laporan pertanggungjawaban, kurangnya pemahaman dalam pengkajian peluang usaha.

4. KESIMPULAN

Kabupaten Siak memiliki kebijakan Siak Kabupaten Hijau yaitu Kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2018 yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022. Kebijakan Siak Hijau menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, di mana antara ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berjalan beriringan. Berdasarkan hasil pengabdian Maka kesimpulannya dari penelitian pengabdian inikepada masyarakat bahwa penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa indikator pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ingin dicapai yaitu (1) Peran BUMDes dalam Pembangunan Berkelanjutan, (2) Tahapan strategi pengembangan BUMDes, (3) Pembangunan Desa terintegrasi yang dengan Kebijakan Siak Hijau dan pelaksanaan Program Kampung Hijau. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dimulai dari pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan dengan rincian yaitu: Prakegiatan yaitu (Penilaian BUMDes menggunakan kuisioner, koordinasi dengan Pihak Desa dan BUMDes, Persiapan Pre Test dan Post Test), pelaksanaan Kegiatan yaitu (Penyuluhan Peran BUMDes, Tahapan Strategi Pengembangan BUMDes, dan Pembangunan Desa terintegrasi dengan Kebijakan Siak Hijau dan Program Kampung Hijau. Bagi pemerintah desa dan pihak pengelola BUMDes agar lebih efektif dan inovatif lagi dalam menjalankan unit-unit usaha lain berbasis ekologis dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus dalam mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri untuk mensejahterahkan masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan.

Ucapan Terimakasih: Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Riau, Ketua LPPM Universitas Riau, Dekan FISIP Universitas Riau. Sumber pendanaan kegiatan berasal dari PNBFP FISIP Universitas Riau sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tim Penulis mengucapkan Pemerintah Kampung Dosan yang telah memfasilitasi dan peserta yang telah hadir dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta bantuan dari Mahasiwa MBKM Universitas Riau.

REFERENSI

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pembangunan Pedesaan*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta. Moleong, L., J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Barbara, Zanuttigh., Inigo, J., Losada., Richard, C., Thompson. (2011). 4. Ecologically based approach to coastal defence design and planning. doi: 10.9753/ICCE.V32.MANAGEMENT.50
- Eprianti, E., & Choiriyah, I. U. (2024). Governance of Village-Owned Enterprises in Promoting Economic Growth. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1144>
- Fanji, Tio, Hardika., Achmad, Riyadh. (2024). 1. The Empowering Marine Tourism in Indonesia Through the Crucial Role of BUMDES. *Academia Open*, doi: 10.21070/acopen.9.2024.8183
- Febrina, R., Marta, A., Amin, R. M., Hadi, S., Ferlan, M., & Mento, M. E. (2025). Green Policy-Based Sustainable Development through the Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *E3S Web of Conferences*, 611, 03003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561103003>
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*.
- Hariniati, W., Mardiani, L., & Nabila, L. (2024). Application of social environmental accounting in

- village-owned business enterprises to realize green accounting. *BIO Web of Conferences*, 148, 02030. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414802030>
- Ivan, Lazović. (2021). 8. Ecological marketing in the function of sustainable development.
- Kamil, M. I., & Isnani, A. M. (2024). The village-owned enterprise in the Context of the Villagers' Welfare. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*, 23(3), 2273–2284. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4810>
- Mardiana, M., Prihadyanti, D., & Falah, M. H. (2024). Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Strategy Towards Sustainable Village Development. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 23(2), 91–107. <https://doi.org/10.12695/jmt.2024.23.2.1>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Pin-Jing, He. (2010). 2. Full-scale practice of ecologically based landfill of municipal solid waste: to accelerate the biological conversion inside landfill and cover layers. doi: 10.1007/978-3-642-04460-1_14 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2017. Universitas Brawijaya, Malang.
- Rares, J., Mamentu, M., & Londa, V. (2023). Enhancing the Management and Sustainability of Village-Owned Enterprises (Bumdes): A Comprehensive Analysis of Key Strategies for Implementation. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2360>
- Rukin, 2021. Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rusyan, Tabrani, 2018. Membangun Keuangan Desa, Bumi Aksara, Jakarta. Rusyan, Tabrani, 2018. Membangun Kepala Desa Teladan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saragi, P. Tumpal, 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, IRE Press, Yogyakarta.
- Surya, putra anom. (n.d.). *Badan Usaha Milik Desa: spirit usaha kolektif desa kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi republik indonesia*.
- Syafaat, M., & Eprilianto, D. F. (2024). *Management Strategies of Village-Owned Enterprises in Tanjungharjo Village, Bojonegoro*. 3(2), 63–79. <https://doi.org/10.63019/serunai.v3i2.67>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.).
- Wasistiono, Sadu dan M. Iwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, CV. Fokus Media, Bandung.
- Widia, Oktari., Desriadi., Ridan, Aidil., Yogi, Syahputra. (2024). 3. Analysis of the role of bumdes as an efforts to empower village communities. doi: 10.69745/ijsspp.v2i1.71

